

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Akuntansi keuangan (pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi di tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi dilakukan dengan merubah UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan UU No.25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang diatas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khususnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kewenangan tersebut adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan

danayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, serta mendorong timbulnya inovasi.

Bastian (2001:6) menyatakan bahwa diperlukan suatu laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan keuangan daerah itu sendiri. Analisis prestasi dalam hal ini adalah kinerja keuangan dari pemerintah daerah itu sendiri yang dapat didasarkan pada kemandirian dan kemampuannya untuk memperoleh, memiliki, memelihara dan memanfaatkan keterbatasan sumber-sumber ekonomis daerah untuk pemenuhan seluas-luasnya kebutuhan masyarakat di daerah.

Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun pendekatan kinerja.Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan. Pembangunan dan pelayanan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. (Mardiasmo, 2002:121).Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah yang akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya.Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Hal ini sangat penting karena sering terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi miskin di Indonesia. Dengan Pendapatan Asli Daerah yang sangat kecil, menjadikan daerah ini memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat. Selain itu pula potensi alam NTT belum dioptimalkan untuk menjadi salah satu sumber pendapatan.. Maka dari itu, Pemerintah Daerah kini sedang giat mempromosikan potensi alam yang ada di NTT agar dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah. Selain itu Pemerintah juga terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan retribusi sehingga wajib pajakpun tertib dalam melakukan pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di NTT. Berikut adalah gambaran perkembangan APBD selama 3 (Tiga) tahun anggaran.

Tabel 1.1 Perkembangan APBD Tahun Anggaran 2014-2016

Sumber Pendapatan	2014		2015		2016	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Daerah	2.748.366.237.168	2.787.513.320.677	3.353.173.473.800	3.315.669.415.296	3.708.327.498.000	3.875.554.164.669
Pendapatan Asli Daerah	734.805.391.648	763.300.806.702	872.546.745.800	882.315.240.378	1.003.412.656.000	995.186.120.952
Dana Perimbangan	1.279.158.719.520	1.282.745.347.275	1.512.721.680.000	1.461.922.422.707	2.660.112.890.000	2.839.657.758.567
Lain-Lain Pendapatan yg sah	734.402.126.000	741.467.166.700	967.905.048.000	971.431.752.211	44.801.952.000	40.710.285.150
Belanja Daerah	2.899.283.875.928	2.688.932.744.282	3.523.978.561.028	3.328.496.113.665	3.816.240.501.789	3.702.912.449.649
Belanja Operasi	2.101.433.630.863	1.995.462.822.960	2.487.718.196.681	2.403.062.103.301	2.779.225.133.598	2.733.228.957.059
Belanja Modal	475.695.783.957	407.600.788.970	696.852.477.347	606.702.214.577	633.202.476.402	602.299.044.635
Pembiayaan	150.917.638.833	149.542.638.833	170.805.087.228	171.552.722.158	111.296.492.789	110.246.903.748
Penerimaan Daerah	236.731.163.760	235.104.723.833	255.505.087.228	254.559.322.158	166.296.492.789	165.206.703.748
Pengeluaran Daerah	85.813.525.000	85.562.085.000	84.700.000.000	83.006.600.000	55.000.000.000	54.959.800.000

Sumber : LRA BPPKAD Prov.NTT

Dari gambaran struktur APBD provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (Tiga) tahun anggaran, pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2014-2016 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun-ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Sejak tahun 2015, Penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah NTT yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI memperoleh nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sejak tahun tersebut itu juga, Sistem Pengendalian dan Pengelolaan Keuangan Lingkup Pemerintah Daerah menggunakan Sistem Basis Akrual. Maka dari itu, berdasarkan dua (2) argument ini, Penulis mencoba Mengevaluasi Kinerja Pengelolaan Daerah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

Dari gambaran Laporan Capaian Kinerja Keuangan Pemerintah selama 3 (Tiga) tahun anggaran ini, masih banyak realisasi Anggaran Pendapatan maupun Belanja Daerah yang belum mencapai target yang ditetapkan. Dilihat dari sisi Pendapatan menunjukkan bahwa persentase realisasi pajak maupun retribusi daerah masih kurang dari target hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak khususnya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKxB),

dan pemanfaatan asset daerah yang belum optimal pada beberapa SKPD yang menyebabkan penerimaan retribusi daerah yang belum optimal,

Dilihat dari sisi Belanja menunjukkan bahwa persentase realisasi belanja masih kurang dari target yang diharapkan hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman karyawan terhadap regulasi utamanya Peraturan Presiden No. 54 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan kurangnya realisasi Bantuan Sosial diakibatkan oleh tidak adanya rekening Bank penerima Bantuan, serta kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa karena belum memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Fenomena yang terjadi, maka kinerja yang diharapkan dari Pemerintah Daerah sendiri yaitu : (1) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, (2) Melaksanakan fungsi-fungsi pengendalian dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka,masalah yang dapat dirumuskan adalah :Bagaimana Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014-2016 ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2014-2016.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat setelah melakukan penelitian ini adalah :

1. Mendorong setiap instansi untuk lebih selektif dalam merencanakan program dan atau kegiatan.
2. Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja.
3. Sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Sebagai informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.